



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Prses Penyusunan Anggaran Daerah :: Studi Terhadap Peroses Penilaian Usulan Kegiatan oleh tim Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif dalam Penyusunan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003

AKBAR, Mohammad Yulian, Dr. Pratikno, M.Soc. Sdi

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id>

Salah satu fase krusial dalam proses penyusunan anggaran daerah adalah tahap penilaian usulan kegiatan baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif. Berbagai bentuk distorsi dalam proses penyusunan anggaran di daerah setidaknya melibatkan aktor utama dalam proses penilaian tersebut yakni Tim Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses penilaian usulan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif dalam penyusunan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penilaian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Variabel-variabel yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah berupa faktor internal yang terdiri dari kualitas sumber daya manusia Tim Anggaran, struktur organisasi, standar kriteria penilaian dan bargaining politik anggaran, sedangkan faktor eksternal berupa intervensi partai politik dan pemerintah atasan serta partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi proses penilaian usulan kegiatan unit kerja pada penyusunan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBD Kabupaten Pekalongan TA. 2003 yang secara administratif disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja telah mengabaikan beberapa tahapan proses penjangkaran aspirasi masyarakat yang berakibat tidak disusunnya arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD. Proses penilaian usulan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif dilakukan tanpa adanya kriteria standar penilaian yang jelas, sehingga masing-masing aktor menetapkan kriteria berdasarkan persepsi dan interpretasi individu. Hal ini mendorong proses penilaian usulan kegiatan menjadi ajang *bargaining* dan transaksi anggaran antara eksekutif dan legislatif. Proses penilaian usulan kegiatan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang ada di Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif. Faktor internal tersebut berupa rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, ketidakjelasan struktur organisasi, tidak adanya kriteria sebagai standar penilaian dan bargaining politik anggaran, sementara faktor eksternal terdiri dari intervensi partai politik dan intervensi pemerintah atasan serta partisipasi masyarakat.

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif dalam proses penyusunan APBD adalah untuk penyusunan anggaran ke depan adalah penyusunan standar kriteria yang bisa dijadikan sebagai pedoman penilaian tiap usulan kegiatan, untuk mengantisipasi persoalan rendahnya kualitas SDM di Tim Anggaran perlu dilakukan pengiriman personalia Tim Anggaran mengikuti Diklat atau kursus penyusunan anggaran berbasis kinerja, perlunya dilakukan restrukturisasi struktur organisasi kepanitiaan anggaran yang menekankan pada spesialisasi tugas dan tata kerja organisasi yang jelas serta pada penentuan personil Tim Teknis Anggaran sehingga tidak hanya terdiri dari personil BAPPEDA dan bagian Keuangan semata, Tim Konsultan (UNDIP) untuk tidak hanya terbatas menjadi konsultan teknis akuntansi belaka tetapi sekaligus penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD.

ABSTRACT



The arrangement

Analisis Prses Penyusunan Anggaran Daerah :: Studi Terhadap Peroses Penilaian Usulan Kegiatan oleh tim Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif dalam Penyusunan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003

of many problems that of society are still many affairs Number 29/2002 actually has made an effort to accommodate the role and the importance of society, especially in the process of society's aspiration action of snaring. That is the only space for society's involvement in arranging the budget, before it becomes Executive and Legislative 'prerogative right' that has budget right, with the major actor Executive Budget Team and Legislative Budget Committee. The most determined step in the process of *APBD* arrangement is the assessment of various proposal of working unit activity. Therefore, this research intends to describe how the process of assessment the proposal of activity that is done by Executive Budget Team and Legislative Budget Committee in the *APBD* arrangement of Pekalongan Regency in Budget Year 2003 and to know the influencing factors in the assessment process.

The method used is qualitative, which the received data is from interview, observation, and documentation. The variables used to reach the research purpose are internal factor and external factor that are in the executive Budget Team and Legislative Budget Committee in influencing the process of assessment the proposal of working unit in the *APBD* arrangement of Pekalongan Regency in Budget Year 2003.

The result of the research shows that the *APBD* arrangement of Pekalongan Regency in the Budget Year 2003 that administratively arranged by using working behavior approach has neglected some steps of society's aspiration action of snaring which causes no arrangement of direction and *APBD* general policy and also strategy and priority of *APBD*. The process of assessment the proposal of activity that is done by the Executive and Legislative Budget Team is without marking standard criteria that is standard and formal, so that each actor determines criteria based on individual perception and interpretation. This matter supports the process of assessment the proposal of activity becomes a bargaining arena and budget transaction between executive and legislative. The process of assessment the proposal of activity is influenced by internal and external factor in Executive and Legislative Budget Team. That internal factor is the lowness of Human Resource quality, the vagueness of organization structure, the non-criteria existence as a marking standard and bargaining of political budget, while external factor consists of political party, upper class government intervention and society participation.

Some suggestions that can be proposed in the connection with problems that are faced by Executive and Legislative Budget Team in the *APBD* arrangement process are for the budget arrangement in the coming years, the beginning of the arrangement of criteria standard that can be a marking guidance of every proposal of activity, for anticipating the problems of the lowness of Human Resource quality in the budget team require to be delivered to follow courses arrangement of *APBD* based on performance, the need of restructuring the budget committee organization structure that emphasize on the job specialization and the clear organization of working system and also determination of personnel in Budget Technical Team not only consists of BAPPEDA and Financial department, UNDIP as consultant should not only limited become technical consultant in accountancy but also in arrangement of AKU and strategy and priority of *APBD*.